

ABSTRAK

ANALISIS PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG (Studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020)

Oleh :

Bangkit Agung Arif Bangsawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang mengadakan pemilihan kepala daerah/Pemilihan Wali Kota, dalam hal ini pemilihan Wali Kota pada tahun 2020. Selama pelaksanaan pemilu berlangsung, ada sejumlah permasalahan, di antaranya adalah *Money Politic* atau politik uang, Sengketa hasil pemilihan, hingga putusan sidang Bawaslu yang mengejutkan banyak pihak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan Pemilu pada pengeyenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Bentuk pengawasan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan sudah cukup baik, melalui tahap pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum sesuai Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan kinerjanya didasri dengan Dasar Hukum atau tumpuan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan telah menjalankannya sesuai dengan Undang-undang tersebut. Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dikatakan belum berhasil, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu masih belum bisa menyelesaikan permasalahan *money politic* yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung selama ini bisa dilihat atau dibuktikan dalam melakukan tindakan pengawasan serta penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye hingga masa pemilihan. Bawaslu sepenuhnya sudah sesuai namun dengan keterbatasan Bawaslu menjadikan Bawaslu tidak bisa menindak lajuti keputusan Bawaslu mengingat dalam penanganannya terdapat tiga lembaga yang memegang keputusan hal ini menjadikan kinerja Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya kurang maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Bawaslu

ABSTRACT

***ELECTION SUPERVISION ANALYSIS BY THE LAMPUNG PROVINCE
ELECTION SUPERVISORY AGENCY
(A case study of violations of the 2020 local elections in the city of Bandar Lampung)***

By:

Bangkit Agung Arif Bangsawan

The Election Supervisory Board (abbreviated as Bawaslu) is an election organizing agency that is tasked with overseeing the implementation of elections in all regions of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Bandar Lampung City is one of the cities that held regional head elections / Wali Kota Elections, in this case the Mayor election in 2020. During the election, there were a number of problems, including *Money Politic* or money politics, disputes over election results, to the verdict of the Bawaslu trial that surprised many parties. The purpose of this study is to analyze how the Election Supervisory Board in monitoring elections in the implementation of simultaneous elections in 2020 in Bandar Lampung City.

The type of research used in this study is a descriptive type with qualitative approaches, data collection techniques, observations, interviews, documentation. The results of this study show that the form of Bawaslu's form of supervision in carrying out supervision during the election period is said to be quite good, through the stage of prevention, supervision and enforcement of election violations in accordance with Bawaslu Lampung Province in carrying out its performance based on the Legal Basis or pedestal, namely Law No. 7 of 2017 on General Elections, and has carried it out in accordance with the Law. Bawaslu in carrying out supervision during the election period is said to have not succeeded, this is because in carrying out its performance Bawaslu still cannot complete the *money politic* problems that occurred. The supervision carried out by Bawaslu Lampung Province so far can be seen or proven in carrying out surveillance actions and handling violations during the campaign period until the election period. Bawaslu is fully in accordance but with bawaslu limitations make Bawaslu can not act on the pace of Bawaslu's decision considering that in its handlers there are three institutions that hold this decision making Bawaslu's performance in carrying out its duties less than optimal.

Keyword : Surveillance, Bawaslu